

LAPORAN
RENCANA KINERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2017



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BIMA

Jl. Gajah Mada No. 10 Kel.Pane Kota Bima-NTB

2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-nya sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dapat menyelesaikan Laporan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017.

Laporan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 merupakan sarana akuntabilitas dan sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima serta dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam mengambil langkah- langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima di masa- masa mendatang

Laporan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 merupakan sebuah cara pengukuran kinerja yang efektif untuk mengukur sekaligus mengevaluasi tingkat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat sesuai dengan bidangnya yang dilakukan secara kontinyu dan merupakan suatu gambaran konkrit sebuah instansi dalam menjalankan, menghasilkan dan sekaligus memperbaiki kinerja berdasarkan aturan yang berlaku serta dapat diperanggung jawabkan baik secara teknis maupun secara administrasi.

Atas dukungan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima diucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.

Kota Bima, Februari 2018
Kepala Dinas,

Drs. H. Hajairin, MS
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19580605 198002 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Tabel- Tabel	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2017	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD	6
2.1. Efektifitas individual kegiatan	6
2.2 Efektifitas Pencapaian Sasaran	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	23
2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	23
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
2.5.1. Program Usulan	31
2.5.2 Kegiatan	31
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	33
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	33
3.1.1. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi	33
3.1.2. Sumber daya Organisasi	34
3.2 Tujuan dan Sasaran	44
3.2.1. Tujuan	44
3.2.2. Sasaran	44

3.3. Program dan Kegiatan	44
3.3.1 Program	44
3.3.2. Kegiatan	45
BAB IV. PENUTUP	47
LAMPIRAN MATRIK RENCANA KERJA(RENJA) 2018	
Lampiran Pagu Indikatif Beserta sumbernya perkiraan Maju	
Lampiran Rekap PAD sampai Bulan Agustus 2017	
Lmapiran Duk per Desember 2017	

TABEL – TABEL

		Halaman
Table. 1	Pengukuran Kinerja	8
Table. 2	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.....	9
Table .3	Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran	22
Table.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima	22
Tabel. 5	Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah dalam semangat desentralisasi dan reformasi saat ini telah menimbulkan berbagai dampak yang sangat dinamis, tuntutan percepatan dan sinkronisasi pembangunan menjadi hal yang tidak bisa ditawar – tawar lagi dalam upaya menyelaraskan pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Tentunya dalam upaya yang dimaksud di atas, langkah – langkah strategis dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi persyaratan paling mutlak harus dilaksanakan oleh Institusi Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Jangka Panjang, Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan Daerah.

Kota Bima sebagai salah satu Daerah Otonom di wilayah Provinsi NTB sesuai Undang Undang nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintahan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat, tentunya harus berupaya untuk mengelola sumber daya yang ada di daerah sebaik – baiknya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah mengingat semakin berkurangnya ketergantungan pada pemerintah pusat. Maka untuk mendukung kebijakan daerah Kota Bima serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang perijinan dibentuklah SKPD Kantor Pelayanan Perijinan terpadu Kota Bima yang mempunyai kewenangan dalam pelayanan perijinan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima

Dengan adanya kebijakan tersebut membawa dampak perubahan pada sistem manajemen administrasi yang ada, dimana pemerintah Kota Bima diharapkan melaksanakan pembenahan pada aspek refitalisasi organisasi kelembagaan dengan cara menata kembali struktur organisasi secara terus menerus yang efektif dan efisien. Selain itu juga melakukan peningkatan profesionalisme aparatur

untuk menciptakan Sumber Daya Aparatur yang mumpuni sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan Kota Bima sejak berdirinya hingga akhir tahun 2008 mengarah pada aktifitas perkotaan yang berfokus pada pelayanan jasa dan aktifitas non pertanian lainnya, hal ini ditandai adanya alih fungsi lahan menjadi sektor usaha jasa dan pembangunan gedung – gedung kantor dan perumahan, tentu saja perkembangan ini harus diikuti dengan perubahan arah kebijakan pembangunan untuk mengoptimalkan penataan ruang dan pembangunan infrastruktur perkotaan yang diikuti dengan pengembangan aktifitas ekonomi lokal yang produktif. Pengembangan tersebut akan merambah pada peningkatan aktifitas

usaha dan jasa yang semakin lama semakin berkembang seperti usaha perdagangan barang, usaha jasa informasi dan telekomunikasi, usaha jasa perhotelan, Penyediaan perumahan huni rakyat dan konstruksi lainnya. Peningkatan aktifitas tersebut merupakan *obyek pendapatan daerah* di bidang perijinan yang sangat potensial, maka Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bima berupaya untuk menangkap peluang yang ada dengan pembenahan – pembenahan fungsi dan penempatan aparaturnya profesional yang mendukung terjadinya pelayanan administrasi yang prima mengingat ketersediaan sumber daya manusia yang handal merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan

Sebuah organisasi yang bermuara pada terciptanya pelayanan yang efisien, konsisten, cepat, tepat, dan terbuka dalam penyelenggaraan perijinan. Upaya ini sebagai salah satu penentu kemajuan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1983 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
2. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat jasa konstruksi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6;
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 15 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Parkir;
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 18 Tahun 2004 tentang Tanda daftar Industri;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;

16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 - 2028;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan.
18. Peraturan Daerah kota Bima Nomor 5 tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan;
21. Peraturan Dearah Kota Bima Nomor 18 Tahun 2004 tentang Tanda Daftar Industri;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapaun maksud dan tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima :

- 1. Tujuan Umum** : Untuk memberikan arah dan pedoman rencana pelaksanaan Program dan kegiatan bidang Penanaman Modal dan Perizinan tahun 2017 sebagai kebijakan dalam mencapai Visi dan Misi SKPD serta Visi dan Misi Kota Bima.
- 2. Tujuan Khusus** :
 - a. Mengetahui Kondisi Umum Pembangunan Bidang Penanaman Modal dan PTSP dan rencana pembangunan menuju tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta visi dan misi Pemerintah Kota Bima selama 1 (satu) tahun .
 - b. Merencanakan Program dan Kegiatan Tahun 2017, SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan Jenis pelayanan (SPM) sehingga dapat menciptakan optimalisasi pelayanan perijinan serta Investasi Penanaman Modal dalam Negeri.
 - c. Sebagai bahan Evaluasi kinerja yang nantinya akan dituangkan dalam LKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2017.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam uraian ini akan di bahas secara rinci tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara rinci dan singkat dan jelas, Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BIMA
TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi kinerja yang dimaksud adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan guna memberikan penjelasan lebih lanjut tentang :

1. Efektifitas dan efisiensi kegiatan
2. Efektifitas pencapaian sasaran.

Disamping itu juga diuraikan mengenai hal –hal yang mendukung keberhasilan dan faktor yang menghambat dan langkah – langkah perbaikan (pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan kinerja untuk masa – masa yang akan datang.

1. Efektifitas individual kegiatan

Efektifitas individual kegiatan adalah merupakan tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk diwujudkan hasil yang diinginkan. Pengukurannya difokuskan pada capaian Edukasi, Sinkronisasi dan koordinasi pelayanan investasi satu pintu secara terpadu

Selama tahun 2017 Dinas penanaman Modal dan PTSP Kota Bima melaksanakan 34 kegiatan strategis berdasarkan hasil pengukuran kinerjanya diperoleh gambaran bahwa 34 kegiatan di atas telah mencapai rata – rata 94,53 % berhasil artinya tingkat efektifitas kegiatan telah dicapai karena angka capaian kegiatan berada di atas angka 80 %.

Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh faktor – faktor antara lain :

1. Tenaga/persenil yang cukup
2. Dana yang memadai
3. Dukungan stake holders dan masyarakat.
4. Sarana dan prasarana yang cukup.

2. Efektifitas Pencapaian Sasaran

Dalam laporan ini sasaran dianggap tercapai apabila realisasi indikator – indikator kinerja sasaran berhasil diwujudkan rata – rata 100 % atau lebih.

Selama tahun 2017 dari 2 (Dua) sasaran strategis yang ingin diwujudkan telah berhasil dicapai 501,41 % dari target 100 %. Hal ini didukung oleh ketersediaan tenaga, dana, sarana dan prasarana yang memadai dan tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan stake holders lainnya.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 dan capaian Renstra SKPD digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan

Evaluasi Pelaksanaan ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari sumber internal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan

Hasil pengukuran kinerja kegiatan adalah sebagaimana tertuang didalam format pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) terlampir dengan ringkasan sebagai berikut :

tabel. 1 Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1% Pertahun	I. Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN - SIUP Mikro Rp. 9.649.000.000 - SIUP Kecil Rp. 83.026.000.000 -SIUP Menengah Rp.46.600.000.000 - SIUP Besar Rp. 95.500.000.000 - Izin Prinsip Rp. 558.300.000.000	Rp. 158.168.020.000	Rp. 793.075.000.000	501,41
		I. Jumlah Investor PMDN - SIUP Mikro 332 Investor - SIUP Kecil 438 Investor - SIUP Menengah 38 Investor - SIUP Besar 4 Investor - Izin Prinsip 1 Investor	751 Investor	810 Investor	107,86
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	I. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan - Persyaratan Nilai 71,83 - Prosedur Nilai 74,83 - Waktu pelayanan Nilai 74,67 - Biaya/ Tarif Nilai 88,00 - Produk spesifikasi jenis pelayanan Nilai 89,00 - Kompetensi pelaksana Nilai 81,00 - Perilaku pelaksana Nilai 81,83 - Maktumat pelayanan Nilai 85,83 - Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Nilai 84,33	Baik (62,51-81,25)	81,25	100

Tabel 2

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2017 (%)	UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KE T.						
										I	II	III	IV	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%								14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17	
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2		Wajib Bukan Pelayanan Dasar																											
	2.12	Bidang Penanaman Modal																											
1.	2.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			0,00	0	0,00	0	0,00	385	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2017 (%)		UNIT PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUN G JAWAB	KE T.		
										I		II		III		IV												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	2.12.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kebutuhan administrasi surat menyurat dan terbayarnya honorarium pegawai honorer / Terlaksananya administrasi kegiatan surat menyurat DPMPTSP	Org / bulan	0,00	0	0,00	0	12,00	59	3,00	6	3,00	17	3,00	10	3,00	24	12,00	57	100,00	96,34	12,00	57	0,00	0,00		
	2.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya telepon dan listrik / Mempercepat akses dan memepelancar pelaksanaan kegiatan honor	bulan	0,00	0	0,00	0	12,00	22	3,00	2	3,00	6	3,00	9	3,00	14	12,00	31	100,00	143,20	12,00	31	0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2017 (%)		UNIT PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWAB	KE T.		
										I		II		III		IV												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp
Indikator		Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	2.12.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional / Efektivitas kerja pegawai DPMPSTP semakin tinggi sehingga diperlukan kendaraan operasional harus prima	unit	0,00	0	0,00	0	2,00	5	0,00	0	1,00	3	0,00	0	1,00	1	2,00	4	100,00	95,42	2,00	4	0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2017 (%)		UNIT PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUN G JAWAB	KE T.		
										I		II		III		IV												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Honorarium Bendahara / Terlaksananya pembayaran honorarium bendahara dan peningkatan kerja	org / bulan	0,00	0	0,00	0	12,00	32	3,00	3	3,00	13	3,00	5	3,00	20	12,00	42	100,00	130,09	12,00	42	0,00	0,00		
	2.12.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	Bulan	0,00	0	0,00	0	12,00	12	3,00	2	3,00	0	3,00	1	3,00	5	12,00	8	100,00	68,59	12,00	8	0,00	0,00		
	2.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Bulan	0,00	0	0,00	0	12,00	24	3,00	8	3,00	6	3,00	5	3,00	17	12,00	35	100,00	147,20	12,00	35	0,00	0,00		
	2.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	0,00	0	0,00	0	12,00	33	3,00	11	3,00	8	3,00	8	3,00	19	12,00	47	100,00	142,34	12,00	47	0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2017 (%)		UNIT PERAN KAT DAERA H PENAN GGUN G JAWAB	KE T.		
										I		II		III		IV												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bulan	0,00	0	0,00	0	12,00	1	4,00	1	0,00	0	0,00	0	8,00	7	12,00	9	100,00	581,36	12,00	9	0,00	0,00		
	2.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Bulan	0,00	0	0,00	0	12,00	4	0,00	0	0,00	0	3,00	1	9,00	2	12,00	4	100,00	87,39	12,00	4	0,00	0,00		
	2.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Org / bulan	0,00	0	0,00	0	12,00	11	3,00	1	3,00	1	0,00	0	6,00	4	12,00	6	100,00	52,59	12,00	6	0,00	0,00		
	2.12.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Bulan	0,00	0	0,00	0	12,00	100	5,00	29	10,00	69	0,00	0	10,00	121	25,00	220	208,33	219,79	25,00	220	0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2017 (%)		UNIT PERAN KAT DAERA H PENAN GGUN G JAWAB	KE T.			
										I		II		III		IV													
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17	
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2.12.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Bulan	0,00	0	0,00	0	12,00	82	0,00	0	3,00	16	3,00	35	3,00	19	9,00	70	75,00	86,13	9,00	70	0,00	0,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					106,94	154,20			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																					ST	ST			SR	SR			
2.	2.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			0,00	0	0,00	0	0,00	135	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	2.12.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	unit	0,00	0	0,00	0	2,00	12	0,00	0	0,00	0	1,00	2	2,00	6	3,00	8	150,00	65,96	3,00	8	0,00	0,00			
	2.12.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	unit	0,00	0	0,00	0	7,00	26	3,00	26	0,00	0	0,00	0	4,00	48	7,00	74	100,00	286,08	7,00	74	0,00	0,00			

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2017 (%)		UNIT PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWAB	KE T.		
										I		II		III		IV												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.12.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Tahun	0,00	0	0,00	0	1,00	71	1,00	10	0,00	0	0,00	0	1,00	11	2,00	21	200,00	29,70	2,00	21	0,00	0,00		
	2.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit / Bulan	0,00	0	0,00	0	2,00	16	10,00	2	20,00	6	25,00	1	30,00	12	85,00	21	4.250,00	131,04	85,00	21	0,00	0,00		
	2.12.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	unit	0,00	0	0,00	0	6,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6,00	2	6,00	2	100,00	66,67	6,00	2	0,00	0,00		
	2.12.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya rutin/berkala peralatan gedung kantor	unit	0,00	0	0,00	0	18,00	6	0,00	0	5,00	1	5,00	2	8,00	3	18,00	6	100,00	99,31	18,00	6	0,00	0,00		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					816,67	113,13			0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2017 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KE T.		
										I	II	III	IV	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%	14 = 6+12	15 = 14/5 * 100%										
1	2	3	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17	
Predikat Kinerja																			ST	ST			SR	SR			
3.	2.12.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			0,00	0	0,00	0	0,00	22	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	2.12.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Stell	0,00	0	0,00	0	35,00	12	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	2.12.03.06	Pengadaan Pakaian Olahraga	Tersedianya pakaian olahraga	Stell	0,00	0	0,00	0	40,00	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			0,00	0,00			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR			

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2017 (%)		UNIT PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWAB	KE T.										
										I		II		III		IV											12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.	2.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			0,00	0	0,00	0	0,00	46	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00									
	2.12.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Laporan	0,00	0	0,00	0	1,00	9	0,00	0	0,00	0	1,00	5	0,00	0	1,00	5	100,00	50,00	1,00	5	0,00	0,00										
	2.12.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan Laporan Keungan Akhir Tahun	Laporan	0,00	0	0,00	0	1,00	3	1,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	3	100,00	100,00	1,00	3	0,00	0,00										
	2.12.06.05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA- DPA/PRKA-DPPA	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA- DPA/PRKA-DPPA	Laporan	0,00	0	0,00	0	4,00	19	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4,00	26	4,00	26	100,00	140,00	4,00	26	0,00	0,00										

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2016)				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2017 (%)		UNIT PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWAB	KE T.						
												I		II		III		IV																
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6				7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17				
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	2.12.06.06	Penyusunan LAKIP dan LPPD	Penyusunan LAKIP dan LPPD	Laporan	0,00	0	0,00	0	2,00	15	2,00	15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,00	15	100,00	100,00	2,00	15	0,00	0,00								
																					Rata-rata Capaian Kinerja (%)		100,00	97,50			0,00	0,00						
																					Predikat Kinerja		ST	ST			SR	SR						
5.	2.12.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI			0,00	0	0,00	0	0,00	57	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00							

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2017 (%)		UNIT PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUN G JAWAB	KE T.																						
										I		II		III		IV																																
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17																												
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																								
	2.12.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Terlaksananya peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Kegiatan	0,00	0	0,00	0	1,00	57	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	28	1,00	28	100,00	49,56	1,00	28	0,00	0,00																						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00	49,56			0,00	0,00																						
Predikat Kinerja																					ST	SR			SR	SR																						
6.	2.12.18	PEMBUATAN APLIKASI PERIZINAN ONLINE			0,00	0	0,00	0	0,00	30	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00																					
	2.12.18.01	Pembuatan Aplikasi Perizinan Online	Pembuatan Aplikasi perizinan online	Paket	0,00	0	0,00	0	1,00	30	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00	0,00			0,00	0,00																						

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2017 (%)		UNIT PERAN KAT DAERA H PENAN GGUN G JAWAB	KE T.		
										I		II		III		IV												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp
										Predikat Kinerja								SR	SR			SR	SR					
7.	2.12.26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN			0,00	0	0,00	0	0,00	202	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	2.12.26.03	Pengembangan Potensi Daerah	Terlaksananya sosialisasi pengembangan potensi daerah	Kegiatan	0,00	0	0,00	0	1,00	73	0,00	0	1,00	73	0,00	0	0,00	0	1,00	73	100,00	99,92	1,00	73	0,00	0,00		
	2.12.26.05	Publikasi peraturan perundang- undangan	Terlaksananya Sosialisasi Publikasi perundang-undangan	Kegiatan	0,00	0	0,00	0	1,00	60	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	60	1,00	60	100,00	100,00	1,00	60	0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2017 (%)		UNIT PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUN G JAWAB	KE T.		
										I		II		III		IV												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.12.26.15	Penyusunan pedoman Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan	Terlaksananya Penyusunan pedoman peningkatan sistem dan prosedur pelayanan perizinan	Kegiatan	0,00	0	0,00	0	1,00	70	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	35	1,00	35	100,00	49,80	1,00	35	0,00	0,00		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100,00	83,24			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																					ST	T			SR	SR		
8.	2.12.27	PROGRAM RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL			0,00	0	0,00	0	0,00	112	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2017 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KE T.		
										I		II		III		IV												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 * 100%		14 = 6+12		15 = 14/5 * 100%		16	17
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.12.27.01	Penyusunan rencana umum penanaman modal kota bima	Penyusunan rencana umum penanaman modal kota bima	Kegiatan	0,00	0	0,00	0	1,00	112	0,00	0	1,00	15	0,00	0	1,00	97	2,00	111	200,00	99,19	2,00	111	0,00	0,00		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					200,00	99,18			0,00	0,00		
Predikat Kinerja																					ST	ST			SR	SR		
9.	2.12.51	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN			0,00	0	0,00	0	0,00	260	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2017 (%)		UNIT PERAN KAT DAERA H PENAN GGUN G JAWAB	KE T.		
										I		II		III		IV												
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										K	Rp
Indikator		Satuan		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2.12.51.02	Penyediaan Informasi/Date Base Perizinan	Tersedianya Informasi/Data base Perizinan	Kegiatan	0,00	0	0,00	0	1,00	13	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1,00	43	1,00	45	100,00	348,08	1,00	45	0,00	0,00		
	2.12.51.03	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan Perizinan	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pendataan perizinan	Bulan	0,00	0	0,00	0	7,00	117	0,00	0	3,00	56	3,00	51	1,00	26	7,00	133	100,00	113,66	7,00	133	0,00	0,00		
	2.12.51.04	Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	Kegiatan	0,00	0	0,00	0	1,00	74	1,00	14	1,00	22	1,00	5	1,00	8	4,00	49	400,00	66,47	4,00	49	0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2017 (%)		UNIT PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KE T.		
										I		II		III		IV											12 = 8+9+10+11	
1	2	3	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
	2.12.51.05	Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan usaha	Proses penerbitan dokumen perizinan usaha	Kegiatan	0,00	0	0,00	0	1,00	56	0,00	0	1,00	8	1,00	6	1,00	14	3,00	28	300,00	50,36	3,00	28	0,00	0,00		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				225,00	144,64			0,00	0,00			
Predikat Kinerja																				ST	ST			SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)									1.249		134		321		150		672		1.276									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																				237,75	114,59			0,00	0,00			

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)		TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2018		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D. RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2017)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s.d tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaa n Renja PD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s.d Tahun 2017 (%)		UNIT PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWAB	KE T.																				
											I	II	III	IV	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 * 100%	14 = 6+12	15 = 14/5 * 100%								16	17																		
1	2	3	Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17																			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																				ST	ST			SR	SR																				

2. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran adalah sebagaimana format Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Terlampir sebagai berikut :

Tabel. 3 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1% Pertahun	I. Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN - SIUP Mikro Rp. 9.629.000.000 - SIUP Kecil Rp. 83.626.000.000 -SIUP Menengah Rp.46.600.000.000 - SIUP Besar Rp. 95.500.000.000 - Izin Prinsip Rp. 558.300.000.000	Rp. 158.168.020.000	Rp. 793.075.000.000	501,41
		II. Jumlah Investor PMDN - SIUP Mikro 332 Investor - SIUP Kecil 438 Investor - SIUP Menengah 38 Investor - SIUP Besar 4 Investor - Izin Prinsip 1 Investor	751 Investor	810 Investor	107,86
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	I. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan - Persyaratan Nilai 71,83 - Prosedur Nilai 74,83 - Waktu pelayanan Nilai 74,67 - Biaya/ Tarif Nilai 88,00 - Produk spesifikasi jenis pelayanan Nilai 89,00 - Kompetensi pelaksana Nilai 81,00 - Perilaku pelaksana Nilai 81,83 - Maklumat pelayanan Nilai 85,83 - Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Nilai 84,33	Baik (62,51-81,25)	81,25	100

Tabel 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Bima

No	Indikator *)	SPM	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	Tahun 2014 (tahun n-2)	Tahun 2015 (tahun n-1)	Tahun 2016 (tahun n)	Tahun 2017 (tahun n+1)	Tahun 2014 (tahun n-2)	Tahun 2015 (tahun n-1)	Tahun 2016 (tahun n)	Tahun 2017 (tahun n+1)	13
1	Tingkat Pertumbuhan PAD		Kenaikan/ penurunan pendapatan daerah dibagi pendapatan tahun lalu	200%	116.67 %	114.29 %	112.5 %	261.83 %	134.03 %	- 101,6 2%	- 96,71 %	
2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan tentang Laporan Keuangan Daerah		Hasil LHP BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

2.2 Analisis Kinerja SKPD

Dalam menganalisis kinerja SKPD yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima meliputi :

1. Keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dan tujuan, misi dan visi.

Mulai dari penetapan Visi, Misi, Sasaran, Program sampai dengan kegiatan harus memiliki keterkaitan hubungan turunan, oleh karena itu antara turunan dengan yang menurunkan harus mempunyai hubungan yang logis sehingga semua komponen dapat diukur. Kegiatan tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima merupakan bagian dari program kerja dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2013 sampai tahun 2018, dan sebagian lagi akan dilaksanakan tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Oleh karena demikian pencapaian tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara bertahap sesuai Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dalam hal ini memiliki hubungan yang sangat logis.

2. Keterkaitan antara Pencapaian Kinerja dengan Pencapaian Sasaran

Berdasarkan uraian – uraian sebelumnya dari 9 Program dan 34 kegiatan tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik dengan capaian sasaran sebesar 94,53 % atau ketidaktercapiannya hanya sebesar 5,47 %.

2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

ISU NASIONAL

Isu – isu nasional meliputi :

1. Perkembangan pembangunan Nasional mengarah pada perubahan kebijakan dimana sektor pertanian tidak lagi menjadi sektor utama akan tetapi kian beralih pada sektor Industri jasa, perdagangan, Perhubungan dan telekomunikasi serta industri lainnya.
2. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama kaitannya dengan kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi.
3. Kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan masih kurang sehingga perlu adanya motifasi dan dorongan program pemandirian dan pemberdayaan terutama keberpihakan pada ekonomi lemah yang berpotensi sehingga tumbuh dan berkembang menjadi obyek pengembangan perpajakan dan retribusi daerah.

ISU REGIONAL DAN DAERAH

Isu – isu daerah dan regional yang berkembang adalah :

1. Pertumbuhan penduduk yang kian besar membutuhkan ruang yang cukup untuk menampungnya, akan tetapi luas lahan yang tersedia makin berkurang, kebutuhan akan perumahan, sarana dan prasarana jalan harus terus ditingkatkan untuk itu perlu adanya penataan ulang ruang dan lahan sehingga dapat teralokasi dengan baik pada semua bidang pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2. Fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman pada gilirannya dapat merubah kebijakan pembangunan pada sektor industri dan jasa sehingga menjadi area untuk tumbuh dan berkembangnya perdagangan barang dan jasa, Teknologi telekomunikasi dan informasi serta perhotelan dan restoran.
3. Sampai dengan tahun 2007 terdapat empat sektor utama yang menyumbang pertumbuhan PDRB terbesar antara lain : (1). Sektor Jasa dapat menyumbang 26,20 %, Sektor Pertanian sebesar 21,14 %, sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 18,50 % dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 12,95 % sehingga pengembangan sektor di atas perlu terus ditingkatkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang selama ini hanya bergantung pada sektor pertanian semata.
4. Upaya mengembangkan Pemerintahan yang baik "Good Governance" masih sekedar wacana yang meluas sehingga perlu penataan kelembagaan yang mengarah pada terselenggaranya efisiensi dan efektifitas serta produktifitas dalam pengelolaan pemerintahan.

Maka upaya mengoptimalkan peran dan fungsi aparatur yang profesional menjadi hal utama dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas pelayanan publik yang prima.

2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Merupakan suatu indikator kinerja sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan dari uraian-uraian sebelumnya Rancangan program awal di tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima telah berhasil melaksanakan 9 program dengan 34 kegiatan dengan capaian sasaran sebesar 94,53 % atau ketidakcapaian hanya sebesar 5,47 %.

Terbukti dengan pencapaian Penerimaan Daerah yang mencapai target 96,71% di tahun 2017 dengan akuntabilitas laporan keuangan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Penerimaan Daerah

Sebagai SKPD yang bertugas melayani perizinan yang terpusat Dinas Penanaman Modal dan PTSP melayani semua perizinan yang sebelumnya ditangani oleh masing –masing Dinas terkait.

Selama tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima telah melaksanakan pelayanan perizinan dengan Target Rp. 400.000.000 ,- dengan realisasi Penerimaan total sebesar Rp. 386.840.380,- atau rata –rata terealisasi sebesar 96,71% dengan rincian Retribusi Izin Gangguan (HO) .dimana semua penerimaan daerah tersebut telah disetor langsung ke rekening Kas Daerah.

Target dan realisasi Penerimaan Daerah masing – masing Dinas terkait atau realisasi semua jenis ijin sampai dengan bulan Agustus 2017 terlampir pada

2. Akuntabilitas Pengeluaran SKPD

Selama tahun 2017 anggaran kegiatan sebesar dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.1.350.231.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.276.360.472,00 - atau 94,53 %.

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip pelaporan yang lazim dengan pertanggung jawaban yang telah sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku, secara efektif dan efisien serta mengusahakan semaksimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

Tabel 5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kota Bima

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	KOTA BIMA	Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal	94,41 %		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	KOTA BIMA	Peningkatan Kualitas Pelayanan Internal	94,41 %		
	Penyediaan Jasa surat Menyurat		Tersedianya Jasa surat menyurat	Terlaksananya surat-surat kedinasan	59.400.000,-	Tersedianya Jasa surat menyurat		Terlaksananya surat-surat kedinasan		57.225.000,-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Pembayaran Telpon, air dan listrik 12 bulan	37.200.000,-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Pembayaran Telpon, air dan listrik 12 bulan	30.930.475,-	
	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan	50 service 2 STNK	4.500.000,-	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan	50 service 2 STNK	4,294,000,-	

	operasional		dinas/ operasional			operasional		dinas/ operasional			
	Penyediaan Jasa administrasi keuangan		Tersedianya Jasa administrasi keuangan	12 bulan	41.508.000,-	Penyediaan Jasa administrasi keuangan		Tersedianya Jasa admistrasi Keuangna	12 Bulan	41.508.000,-	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya Jasa kebersihan kantor	12 jenis dan alat pembersihan	7.915.000,-	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Tersedianya Jasa kebersihan kantor	12 jenis dan alat pembersihan	7,915,000,-	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alata tulis kantor	1000 jumlah ATK	35.397.000,-	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alata tulis kantor	1000 jumlah ATK	35.397.000,-	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya baranng cetakan dan penggandaan	50000 copy, 500 jild	49.251.000,-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tersedianya baranng cetakan dan penggandaan	50000 copy, 500 jild	46.901.000,-	
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik.penerangan bangunan kantor	284 jmlh alat listrik	8.575.000,-	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik.penerangan bangunan kantor	284 jmlh alat listrik	8.575.000,-	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	5.760.000,-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	3.810.000,-	
	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makanan dan minuman	50 kali	9.900.000,-	Penyediaan makanan dan minuman		Tersedianya makanan dan minuman	50 kali	5.995.000,-	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 laporan perjalanan dinas	221.315.000,-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 laporan perjalanan dinas	219.788.058,-	
	Rapat-rapat koordinasi dan		Rapat-rapat koordinasi	100 laporan	83.520.000,-	Rapat-rapat koordinasi dan		Rapat-rapat koordinasi	100 laporan	70.385.000,-	

	konsultasi dalam daerah		dan konsultasi dalam daerah	perjalanan dinas		konsultasi dalam daerah		dan konsultasi dalam daerah	perjalanan dinas		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOTA BIMA	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kerja	99,63%		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	KOTA BIMA	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kerja	99,63%		
	Pengadaan perlengkapan gedung kanror		Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	14 unit	7.750.000,-	Pengadaan perlengkapan gedung kanror		Terlaksananya perlengkapan gedung kantor	14 unit	7.750.000,-	
	Pengadaan peralatan gedung kantor		Terlaksananya peralatan gedung kantor	15 unit	74.380.000,-	Pengadaan peralatan gedung kantor		Terlaksananya peralatan gedung kantor	15 unit	74380000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25 unit	21.205.700,-	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25 unit	21.205.700,-	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 kendaraan	21.925.300,-	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 kendaraan	21.469.147,-	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5 perlengkapan kantor	2.000.000,-	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5 peralatan kantor	2.000.000,-	
	Pemeliharaan rutin/berkala		Terlaksananya	5 peralatan	6.400.000,-	Pemeliharaan rutin/berkala		Terlaksananya	5 peralatan	6.356.000,-	

	peralatan gedung kantor		pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	gedung kantor		peralatan gedung kantor		pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	gedung kantor		
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Kota Bima	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur	0		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Kota Bima	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur	0		
	Pengadaan pakaian KORPRI		Tersedianya pakaian Korpri	35 buah	0	Pengadaan pakaian KORPRI		Tersedianya pakaian KORPRI	35 buah	0	
	Pengadaan Pakaian Olah Raga		Tersedianya Pakaian Olah raga	35 buah	0	Pengadaan pakaian olah Raga		Pengadaan pakaian olah raga	35 buah	0	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kota Bima	Persentase SKPD Dengan Indeks SAKIP Baik	91,55%		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kota Bima	Persentase SKPD Dengan Indeks SAKIP Baik	91,55%		
	Penyusunan laporan keuangan semesteran		Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 dok laporan keuangan semesteran SKPD, 1 dok laporan keuangan semesteran pemkot bima	9.000.000,-	Penyusunan laporan keuangan semesteran		Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 dok laporan keuangan semesteran SKPD, 1 dok laporan keuangan semesteran pemkot bima	4.500.000,-	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 dok pelaporan keuangan skpd, 1 dok laporan	3.000.000,-	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun	1 dok pelaporan keuangan skpd, 1 dok laporan	3.000.000,-	

				keuangan pemkot bima					keuangan pemkot bima		
	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja peragkat daerah		Tersusunnya Renja/RKA/DPA dan DPPA	Dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA	26.250.000,-	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja peragkat daerah		Tersusunnya Renja/RKA/DPA dan DPPA	Dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA	26.250.000,-	
	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD		Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPPD	Dokumen LAKIP dan LPPD	15.000.000,-	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD		Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPPD	Dokumen LAKIP dan LPPD	15.000.000,-	
	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Kota Bima	Terlaksananya peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha		84,23%	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Kota Bima	Terlaksananya peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha		84,23%	
	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha		Terlaksananya peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	1 Kegiatan	33.300.000,-	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha		Terlaksananya peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	1 Kegiatan	28.050.000,-	
	PEMBUATAN APLIKASI PERIZINAN ONLINE	Kota Bima	Pembuatan Aplikasi perizinan online		0	PEMBUATAN APLIKASI PERIZINAN ONLINE	Kota Bima	Pembuatan Aplikasi perizinan online		0	
	Pembuatan Aplikasi Perizinan Online		Pembuatan Aplikasi perizinan online	1 Aplikasi	0	Pembuatan Aplikasi Perizinan Online		Pembuatan Aplikasi perizinan online	1 Aplikasi	0	

	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Kota Bima	Sosialisasi Pengembangan Potensi daerah	5 kecamatan	96,72%	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Kota Bima	Sosialisasi Pelayanan Perijinan satu pintu	5 kecamatan	96,72%	
	Pengembangan Potensi Daerah		Terlaksananya sosialisasi pengembangan potensi daerah	1 Kegiatan	72.695.000,-	Publikasi Peraturan Perundang-undang	1 Kegiatan	Terlaksananya sosialisasi pelayanan perijinan satu pintu	1 Kegiatan	72.695.000,-	
	Publikasi peraturan perundang-undangan		Terlaksananya Sosialisasi Publikasi perundang-undangan	1 Kegiatan	59.510.000,-	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Kegiatan	Tersedianya Sisdur Kota Bima yang sistematis	1 Kegiatan	59.510.000,-	
	Penyusunan pedoman Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan		Terlaksananya Penyusunan pedoman peningkatan sistem dan prosedur pelayanan perizinan	1 Kegiatan	40.585.000,-	Penyusunan pedoman Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan	1 Kegiatan	Terlaksananya Penyusunan pedoman peningkatan sistem dan prosedur pelayanan perizinan	1 Kegiatan	34.925.000,-	
	PROGRAM RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal	1 Kegiatan		PROGRAM RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL	Kota Bima	Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal	1 Kegiatan	99,07%	
	Penyusunan rencana umum penanaman modal kota bima		Penyusunan rencana umum penanaman modal kota bima	1 Kegiatan	112.080.000,-	Penyusunan rencana umum penanaman modal kota bima		Penyusunan rencana umum penanaman modal kota bima	1 Kegiatan	111.037.592,-	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN	Kota Bima	Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang prima			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN	Kota Bima	Terwujudnya Pelayanan Perizinan yang prima		90,96%	
	Penyediaan Informasi/Data Base Perizinan		Tersedianya Informasi/Data base Perizinan	1 Kegiatan	46.250.000,-	Penyediaan Informasi/Data Base Perizinan		Tersedianya Informasi/Data base Perizinan	1 Kegiatan	45.250.000,-	

	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan Perizinan		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pendataan perizinan	1 Kegiatan	156.894.000,-	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan Perizinan		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pendataan perizinan	1 Kegiatan	132.639.000,-	
	Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu		Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	1 Kegiatan	49.500.000,-	Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu		Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu	1 Kegiatan	49.354.500,-	
	Pelayanan proses penertib andokumenperizinan usaha		Pelayanan proses penertib andokumenperizinan usaha	1 Kegiatan	28.265.000,-	Pelayanan proses penertib andokumenperizinan usaha		Pelayanan proses penertib andokumenperizinan u saha	1 Kegiatan	28.265.000,-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Program Usulan

Program Usulan kerja operasional Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategis organisasi yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan tahun yang akan datang untuk melaksanakan suatu rencana. Adapun Program Usulan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
8. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Perijinan.

Dari Program Usulan tersebut Program yang merupakan media untuk Peningkatan pemahaman SKPD untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan individual maupun peningkatan Dinas umumnya, khususnya Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima

2.5.2. Kegiatan

Adapun Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional .
4. penyediaan jasa administrasi keuangan.
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

6. Penyediaan alat tulis kantor.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
8. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang – Undangan.
- 10 Penyediaan makanan dan minuman.
- 11 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- 12 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
- 13 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 14 Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- 15 Pengadaan Meubeler
- 16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- 17 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
- 19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- 20 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
- 21 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- 22 Pengadaan pakaian olah raga.
- 23 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
- 24 Penyusunan pelaporan Keuangan semesteran
- 25 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 26 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 27 Penyusunan LAKIP, LPJ, dan LPPD.
- 28 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan
Pemerintah dan dunia usaha
- 29 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
Penanaman Modal

- 30 Penyusunan cetak biru (Master Plan) Pengembangan penanaman Modal
- 31 Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di daerah
- 32 Kajian kebijakan penanaman Modal
- 33 Penyedia Informasi/DataBase Perizinan

- 34 Monitoring dan evaluasi kegiatan pendataan perizinan
- 35 Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu
- 36 Penyusunan Pedoman Peningkatan system dan prosedur pelayanan perizinan
- 37 Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 38 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
- 39 Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
- 40 Penyusunan Laporan Realisasi Perijinan
- 41 Pendataan potensi obyek perijinan

Dari kegiatan yang di laksanakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pelayanan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang perizinan dan Penanaman Modal , maka dengan adanya penambahan suatu kegiatan baru akan memberikan suatu kontribusi yang sangat baik untuk menunjang suatu kegiatan program.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Terhadap Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

3.1.1 Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima serta Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima memiliki peranan strategis dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah serta Pelayanan di bidang Penanaman Modal disamping itu juga Dinas Penanaman Modal dan PTSP ikut menentukan kemajuan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan adalah menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang koordinasi Penanaman Modal dan PTSP antara lain melakukan fungsi :

1. TUGAS

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

2. FUNGSI

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

3.1.2 Sumber Daya Organisasi

2.2.1 Sumber Daya Aparatur terdiri dari :

A. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

B. Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan;
 - c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara dilingkungan dinas;

- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

C. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
 - e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
 - f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
 - g. Penyusunan laporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, dan ;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

D. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan di bidang penanaman modal dan perizinan;
- d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang penanaman modal dan perizinan;
- e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. Pengumpulan, pengolahan penyajian data dan statistik di bidang penanaman modal dan perizinan;
- g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepegawaian;
- h. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
- i. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Kepala Bidang Penanaman Modal

1. Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan Operasional Penyusunan program kerja dibidang penanaman modal daerah;
 - b. Merencanakan Operasional Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penanaman modal daerah;
 - c. Memberi petunjuk Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi dan investasi;
 - d. Memberi petunjuk Perumusan bidang usaha yang tertutup atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
 - e. Mengatur Pemetaan investasi daerah terkait dengan SDM dan UMKM serta usaha besar;

- f. Mengatur Perumusan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
- g. Mengatur Perumusan usulan dan pemberian insentif diluar fiskal dan non fiskal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan penanaman modal;
- i. Membagi tugas Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Mengatur Fasilitasi kerja sama dunia usaha dibidang penanaman modal ditingkat kota;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang penanaman modal; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

F. Kepala Seksi Potensi dan Promosi.

1. Seksi potensi dan promosi melaksanakan tugas membantu kepala bidang penanaman modal dalam penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang potensi dan promosi;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana tugas dan fungsi seksipotensi dan promosi sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penggalan informasi mengenai potensi peluang investasi;
 - b. Membimbing bawahan dalam Penggalan informasi mengenai potensi peluang investasi;
 - c. Menyusun formasi perkembangan Penggalan informasi mengenai potensi peluang investasi;
 - d. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan promosi investasi, baik melalau media cetak, elektronik dan pameran.
 - e. Mengumpulkan dan mengolah data Pelaksanaan kegiatan promosi investasi, baik melalau media cetak, elektronik dan pameran.
 - f. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
 - g. Mengumpulkan dan mengolah data guna Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;

- h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan promosi investasi;
- i. Mengevaluasi Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal
- j. Mengevaluasi kajian potensi dan pemasaran penanaman modal;
- k. Melaporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

G. Kepala Seksi Kerjasama

1. Seksi kerja sama melaksanakan tugas membantu kepala bidang penanaman modal melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kerja sama.
2. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tugas dan fungsi seksi kerja sama sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Perumusan kebijakan teknis kerja sama penanaman modal daerah;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka Pemberian dorongan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman modal;
 - c. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
 - d. Mengumpulkan dan mengolah data guna Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
 - e. Menyusun formasi perkembangan Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
 - f. Mengevaluasian hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama penanaman modal daerah;
 - g. Melaporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang kerja sama; dan
 - h. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

H. Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan

1. Melaksanakan pelayanan informasi, pengaduan, dan inovasi pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. Merencanakan operasional Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
 - b. Membagi tugas Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
 - c. Memberi petunjuk Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;

- d. Merencanakan operasional Pelaksanaan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- e. Memberi petunjuk Pelaksanaan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- f. Merencanakan operasional Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap mutu layanan perizinan dan non perizinan;
- g. Menyusun Perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- h. Mengevaluasi hasil Perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
- i. Merencanakan operasional Penyusunan dan pengembangan kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- j. Melakukan Penyusunan dan pengembangan kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- k. Mengevaluasi pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

I. Kepala Seksi Layanan Informasi dan pengaduan

1. Membantu Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan informasi di bidang Layanan Informasi dan Pengaduan.
2. Untuk meyenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- b. Menyusun formasi perkembangan Penyelenggaraan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Mengevaluasi hasil Penyiapan bahan kegiatan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Memeriksa hasil Pendokumentasian dan pengarsipan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Membagi tugas Penyelenggaraan layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- f. Membimbing bawahan dalam Pelaksanaan analisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. Menyusun formasi perkembangan Perumusan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- h. Merencanakan kegiatan Pengkoordinasian penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Melaporkan hasil kegiatan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. Membagi tugas dalam Pelaksanaan monitoring dan evaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

J. Kepala seksi Kebijakan dan Inovasi Pelayanan

1. Membantu Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan dalam bidang Kebijakan dan Inovasi Pelayanan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud sebagai mana dimaksud sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan Penyusunan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- c. Menyusun formasi perkembangan Pelaksanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Menyusun formasi perkembangan Penyiapan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan kepada bawahan;
- e. Mengevaluasi hasil kegiatan Pelaksanaan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan serta model atau tata cara penyuluhan terhadap masyarakat;
- f. Mengumpulkan dan mengolah data bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada bawahan;
- g. Membagi tugas Penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal kepada bawahan;
- h. Membimbing bawahan dalam Pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal;
- i. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

K. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

1. Bidang pelayanan perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
 - a. Merencanakan operasional Penyusunan program kerja dibidang pelayanan perizinan;
 - b. Merencanakan operasional Penyusunan petunjuk teknis pelayanan perizinan;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan;
 - d. Merencanakan operasional Perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
 - e. Memberi petunjuk pelaksanaan PTSP berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota;
 - f. Memberi petunjuk usulan persetujuan fasilitasi fiskal yang menjadi kewenangan kota;
 - g. Mengatur pedoman dan tata cara pengembangan sistem;
 - h. Menyelia permohonan izin dan non izin;
 - i. Memberi petunjuk Pelayanan umum kepada dunia usaha mengenai perizinan yang diperlukan;
 - j. Mengatur Sosialisasi kebijakan terkait dengan pelayanan perizinan berkoordinasi dengan sekretariat;

- k. Memberi petunjuk Pengembangan pelayanan perizinan melalui sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE); dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

L. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

1. Seksi pelayanan perizinan usaha melaksanakan tugas membantu kepala Bidang pelayanan perizinan dalam melaksanakan pelayanan perizinan usaha;
2. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan usaha;
 - b. Membimbing bawahan dalam melakukan identifikasi jenis perizinan usaha;
 - c. Membagi tugas Pengelolaan data perizinan usaha kepada bawahan;
 - d. Menyelia pelaksanaan Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan – persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha;
 - e. Memeriksa hasil Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan – persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha;
 - f. Mengumpulkan dan mengolah data Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan usaha;
 - g. Merencanakan kegiatan Penelitian lapangan dan teknis perizinan bidang usaha dengan tim teknis
 - h. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pelayanan perizinan usaha;
 - i. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - j. Merencanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan perizinan usaha;
 - k. Membimbing bawahan dalam Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang perizinan usaha; dan
 - l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

M. Kepala seksi pelayanan perizinan Non usaha

1. Seksi pelayanan perizinan Non usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas membantu kepala Bidang perizinan dalam melaksanakan pelayanan perizinan non usaha.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan non usaha;
 - b. Membimbing bawahan dalam melakukan Identifikasi jenis pelayanan perizinan non usaha;

- c. Membagi tugas Pengelolaan data dan penetapan retribusi perizinan non usaha;
- d. Membimbing bawahan dalam Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha;
- e. Memeriksa hasil Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha;
- f. Mengumpulkan dan mengolah data Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan non usaha;
- g. Memeriksa hasil Penelitian lapangan dan teknis bidang perizinan non usaha;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha;
- i. Merencanakan Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Membimbing bawahan dalam Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dibidang perizinan non usaha;
- k. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan perizinan non usaha; dan
- l. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Lebih lengkapnya sumber daya aparatur dimuat dalam *Lampiran 02*. Daftar Urut Kepangkatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2017 terlampir.

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan adanya tujuan ini maka fokus organisasi dapat lebih dipertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang ingin dicapai. Tujuan Dinas Penanaman Modal Kota Bima adalah :

” Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima ”

3.2.2. Sasaran

Dalam kaitannya dengan tujuan lima tahunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dipenuhi dalam kurun waktu tersebut. Sasaran merupakan rencana tindakan dan alokasi sumber daya dan dana yang tersedia dan harus dilaksanakan agar dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana jangka panjang, menjadi dasar pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi, serta meningkatkan kesadaran setiap bagian organisasi terhadap kemungkinan adanya permasalahan karena tidak tercapainya harapan. Untuk itu telah ditetapkan sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Rata-rata Investasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) 1% Pertahun
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan
3. Meningkatnya Kuantitas Sistem Informasi PTSP berbasis teknologi
4. Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

3.3. Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan tahun 2017

3.3.1 Program

Program kerja operasional Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima merupakan upaya untuk menimplementasikan strategis organisasi yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu rencana. Program yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi²
4. Pembuatan Aplikasi Perijinan On line
5. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
6. Program Rencana Umum Penanaman Modal
7. Program kualitas pelayanan perijinan

3.3.2. Kegiatan

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program yang menunjang keberhasilan pada tahun 2017 adalah :

- Penyediaan jasasurat menyurat
- Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasaadministrasi keuangan
- Penyediaan jasakebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Peningkatan koordinasi dankerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
- Pembuatan Aplikasi Perizinan Online


- Pengembangan Potensi Daerah
- Publikasi peraturan perundang-undangan
- Penyusunan pedoman Peningkatan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan
- Penyusunan rencana umum penanaman modal kota bima
- Penyediaan Informasi/Date Base Perizinan
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan Perizinan
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu
- Pelayanan proses penertibandokumenperizinan usaha

Jumlah

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP kota Bima Tahun 2017 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP kota Bima dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Dalam melaksanakan Rencana kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang dicapai. Akhir kata semoga Rencana Kerja ini dapat di implemantasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan dengan penganggaran yang sesuai dengan peruntukannya sehingga secara konsisten dapat dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Kota Bima, Februari 2018
Kepala Dinas,

Drs. H. Hajairin, MS
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19580605 198002 1 004